

**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DALAM LINGKUP  
KERJA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESORT PINRANG)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**ALIYYUL QAYYUUM NUGRAHA**  
NIM. 10500113015

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Aliyyul Qayyuum Nugraha  
Nim : 10500113015  
Tempat/Tgl. Lahir : Nimboran, 13 April 1996  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Btn. Griya Patri Abdullah Permai Blok.C5 No.18  
Judul : Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja  
Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Polres  
Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 2 Agustus 2017

Penyusun,

  
Aliyyul Qayyuum Nugraha

NIM : 10500113015

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DALAM LINGKUP KERJA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESORT PINRANG) ", yang disusun oleh Aliyyul Qayyum Nugraha , NIM: 10500113015, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2 Agustus 2017 M,

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (.....)

Munaqisy I : Dr. Muhammad Sabir, M.Ag (.....)

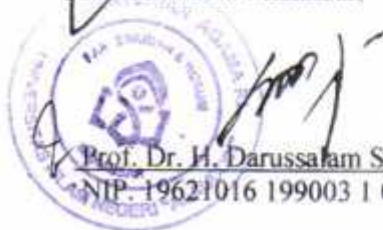
Munaqisy II : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I (.....)

Pembimbing II : St. Nurjannah, S.H., M.H (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang) ”dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. H. Kasjim Salenda, M. Th.I dan Ibu St. Nurjannah. S.H, M.H selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muh. Sabir, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Ashabul Kahfi. S.Ag.,M.H. selaku penguji II yang telah siap memberikan nasehat, saran dan perbaikan dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Kepala Kepolisian Resort Pinrang beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Edi Nugroho, S.Pd dan ibunda Hasnah yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun. Serta kakak tercinta Al Khoriah Etiek Nugraha, S.Sos yang selalu mendampingi serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat terbaik saya Nurfaisa dan Nurul Afifah anggota “trio kwek kwek” yang menemani mendampingi penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini
10. Keluarga besar Ilmu Hukum A Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
11. Keluarga besar Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS), yang telah memberi banyak pelajaran dan pengalaman.
12. Keluarga PPL Sinjai yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

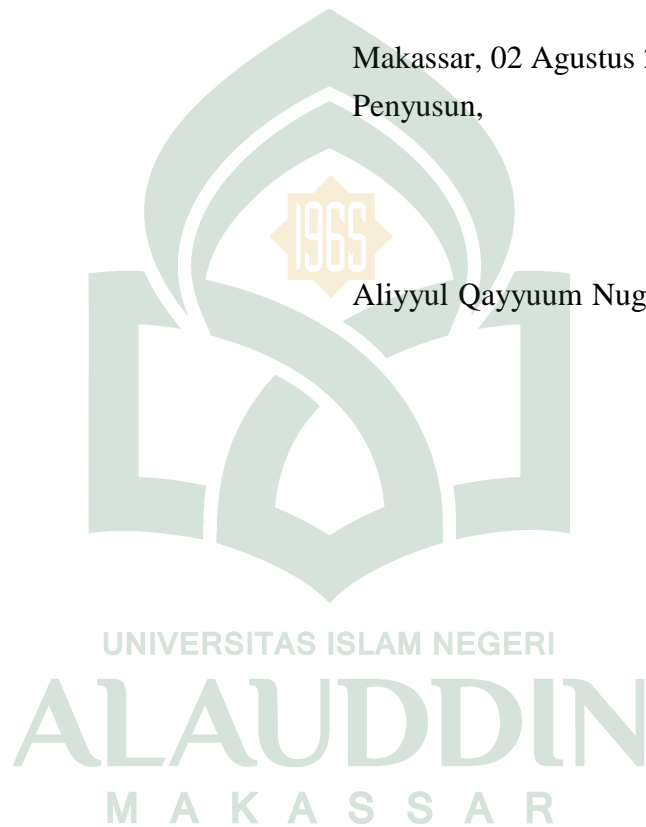
13. Keluarga KKN-R Angkatan 53 kecamatan Tinggimoncong Kelurahan Bontolerung yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 02 Agustus 2017

Penyusun,

Aliyyul Qayyuum Nugraha



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1-9
A. LatarBelakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10-40
A. TinjauanUmumTentang Narkoba.....	10
1. Definisi Narkoba .....	10
2. Sejarah Narkoba .....	10
3. Jenis-Jenis Narkoba.....	14
4. Jenis-Jenis Psikotropika .....	16
5. Jenis-Jenis Zat Adiktif.....	17
6. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkoba .....	19
7. Pandangan Islam Tentang Narkoba.....	20

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	28
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	
1.	Definisi Kepolisian.....	37
2.	Fungsi dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia .....	38
BAB	III METODE PENELITIAN .....	41-45
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian .....	41
B.	Pendekatan Penelitian .....	42
C.	Sumber Data.....	42
D.	Metode Pengumpulan Data .....	42
E.	Instrumen Penelitian.....	43
F.	Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	43
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	44
BAB	IV NARKOBA DAN PENANGGULANGANNYA DI LINGKUP KERJA KEPOLISIAN RESORT PINRANG .....	46-63
A.	Deskripsi Kepolisian Resort Pinrang .....	46
B.	Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang.....	49



C. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredaran narkoba dalam lingkup kerja kepolisian Resort Pinrang .....	57
BAB V PENUTUP.....	64-65
A. Kesimpulan .....	64
B. Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66-67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



## ABSTRAK

**Nama : Aliyyul Qayyum Nugraha**

**NIM : 10500113015**

**Judul : Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja  
Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort  
Pinrang)**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja Kepolisian Republik Indonesia di Polres Pinrang. Pokok masalah tersebut kemudian di-*breakdown* ke dalam beberapa sub permasalahan, yaitu: 1) Faktor apakah yang melatarbelakangi tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang ?, dan 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredaran narkoba pada lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang ?

Jenis penelitian tergolong kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni Yuridis dan Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kasat Reskrim Narkoba Polres Pinrang dan Anggota Polres Pinrang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup Kerja Kepolisian Resort Pinrang yakni berasal dari faktor eksternal, diantaranya faktor ekonomi, adanya kemudahan dan wewenang yang dimiliki kedua faktor itu juga didorong oleh faktor internal yaitu faktor rasa egois. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredaran narkoba yakni dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan pendekatan serta penyuluhan secara edukatif.

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk mencegah keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba, diantaranya dengan mengadakan evaluasi dan tes urine pada waktu tertentu. Serta dalam proses pelaksanaan hukum yang dijalani oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba berjalan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tanpa ada diskriminasi dan toleransi profesi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus sumber daya manusia (SDM). SDM Indonesia tersebut merupakan modal utama dalam mendukung usaha pembangunan nasional. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berkualitas.

Narkoba ( Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup>

Penggunaan narkoba di Indonesia sebagai obat dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin undang-undang. Jauh sebelum undang-undang lahir didalam Al-Quran sudah ada larangan mengkonsumsi Narkoba dalam surat Al-Baqarah2/219

Ayat tersebut membahas tentang larangan mengkonsumsi *khamar*. Pengertian *khamar* dalam bahasa Indonesia adalah minuman keras yang haram hukumnya untuk dikonsumsi. Narkoba dapat digolongkan sesuatu yang haram

---

<sup>1</sup>Siswanto sunarso, *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2004).h.5

dianalogikan (Kias), karena dapat memabukkan penggunanya. Atau dengan kata lain semua zat atau bahan yang mempengaruhi atau mengganggu fungsi akal diharamkan dan secara umum digolongkan dalam pengertian *khamar*.<sup>2</sup>

Selanjutnya di dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa :

Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, serta penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak melawan hukum.<sup>3</sup>

Undang-undang tersebut menjelaskan larangan peredaran narkoba secara ilegal karena dapat mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Selain itu Undang-Undang No.35 tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pengedar narkoba sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Pasal 114 ayat (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga.<sup>4</sup>

Untuk menegakkan sanksi peredaran narkoba kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban

---

<sup>2</sup>Dadang Hawari, *Al Quran Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2004). h.266

<sup>3</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” (Bandung: Fokus Media, 2013). h.4

<sup>4</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” (Bandung: Fokus Media, 2013). h.48

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri termasuk menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi.

Namun pada kenyataannya meskipun peredaran gelap narkoba telah ditegaskan di dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk menagani peredarannya pihak kepolisian sebagai lembaga yang seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi peredaran narkoba malah justru terjerumus pula dalam peredaran narkoba tersebut.

Pengedaran narkoba secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas diberbagai kalangan, tentunya akan semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku instansi yang berwenang dan berperan dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana narkoba juga sudah mulai memperlihatkan kinerja yang sangat baik.

Terbongkarnya kasus peredaran narkoba yang melibatkan aparat Kepolisian berinisial AM di kalimantan timur pada tahun 2015, AM merupakan Briptu di Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Timur. AM terlibat dalam sindikat narkoba di Aceh, Medan, Balikpapan dan Jakarta. Kemudian kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan oknum polisi juga terjadi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah sarang sabu.<sup>5</sup>

Kasus Brigadir Supardi yang bertempat tinggal dikampung Kanni, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pinrang (Polres) di rumah Brigadir Supardi diketahui menyimpan

---

<sup>5</sup>Aji, "BNN Tangkap oknum Polisi Jadi Bandar Sabu dan Ekstasi", Berita Bekasi co.id. 23november 2015. <http://beritabekasi.co.id/2015/11/bnn-tangkap-oknum-polisi-jadi-bandar-sabu-sabu-dan-ekstasi/> ( 23 November 2016)

sabu-sabu seberat 3,4Kg yang disembunyikan pada 2 dua tempat berbeda. 400 gram narkotika jenis sabu-sabu kristal yang dikemas dalam 8 kemasan ukuran 50 gram.<sup>6</sup> Terungkapnya kasus-kasus tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan aparat kepolisian membuktikan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membantu peredaran narkoba.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja kepolisian melalui skripsi yang berjudul : “Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang).

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Berdasarkan latar belakang di atas maka tercapailah pointer fokus sebagai representasi dari fokus penelitian yaitu skripsi ini, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan interpretasi makna pada hal-hal yang bersifat esensial yang dapat menimbulkan kerancuan dalam mengartikan judul, disamping itu juga sebagai penjelas secara redaksional agar mudah dipahami dan diterima oleh akal sehingga tidak terjadi dikotomi antara judul dengan pembahasan dalam skripsi ini. Karena itu, diajukan batasan pengertian guna kesalahpahaman tentang konsep operasional judul penelitian tentang, “Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia ( Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang)”. Sebagaimana berikut:

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian

---

<sup>6</sup>Junedi, “Tertangkap Simpan Sabu-Sabu Seberat 3,4kg Oknum Polisi Terancam Hukuman Mati, Kompas Online. 9 April 2016. [http://googleweb.com/?lite\\_url=](http://googleweb.com/?lite_url=) (23 November 2016)

ditambah awala “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>7</sup>

Peredaran Narkoba dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>8</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>9</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka pokok masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Polres Pinrang)” dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut.

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang ?

---

<sup>7</sup> <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-kriminologi.html?m=1> (25Maret2017)

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” (Bandung: Fokus Media, 2013). h.17

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bab 1, pasal 5 (1)

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredaran narkoba pada lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian, kajian pustaka ini diambil dari berbagai referensi buku dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi terkait pembahasan yang dibahas oleh beberapa penulis.

Tinjauan Kriminologi Peredaran Narkoba (Sabu-Sabu) Di Kabupaten Sidrap (studi kasus tahun 2010-2014), oleh Irvan Syamudra, Tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Sidrap serta upaya apa saja yang dilakukan Polres Sidrap dalam mengatasi maraknya tindak pidana peredaran narkoba di Kabupaten Sidrap. Namun dalam karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, yakni ruang lingkup penelitiannya lebih sempit karena penelitian ini hanya difokuskan pada lingkup kerja Polres Pinrang.<sup>10</sup>

Tindak Pidana Psikotropika Yang Di Lakukan Oleh Anggota POLRI (Studi Putusan Nomor: 92 Pid.B/2009/PN.MKS) oleh Nasrul, Tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anggota POLRI serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana psikotropika yang dilakukan anggota POLRI. Pada skripsi ini hal yang dibahas adalah

---

<sup>10</sup> Irvan Syamudra, "Tinjauan Kriminologi Peredaran Narkoba (sabur-sabur) dikabupaten sidrap (studi kasus tahun 2010-2014), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.



studi putusan dan penerapan hukumnya sementara dalam penelitian ini penyusun berfokus pada penanggulangan peredaran narkoba dilingkup kerja Polres Pinrang.<sup>11</sup>

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI (Studi kasus Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2011/PN.BR.) oleh Randi Ariady Suwardi, Tahun 2013. Srikpsi membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba oleh oknum POLRI pada perkara No. 13/Pid.Sus/2011/PN/BR, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan No. 13/Pid.Sus/2011/PN/BR serta penerapan kode Etik profesi POLRI yang dikaitkan dengan putusan No. 13/Pid.Sus/2011/PN/BR. Karya ilmiah ini membahas tentang penerapan hukum serta kode etik profesi sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait dengan penenggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja kepolisian (polres pinrang).<sup>12</sup>

Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Pedesaan oleh Endy Tri Laksono, Tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta langkah-langkah apa yang digunakan BNN dalam melakukan upaya penanggulangan dan hambatan yang didapat pihak BNN dalam melakukan upaya penanggulangan. Namun karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berfokus pada penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja Kepolisian Resor Pinrang.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Nasrul, "Tindak Pidana Psicotropika yang dilakukan oleh anggota POLRI (studi putusan Nomor : 92 Pid.B/2009/PN.MKS), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2014.

<sup>12</sup>Randi Ariady, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI (Studi kasus Putusan No: 13/Pid.Sus/2011/PN.BR),2013.

<sup>13</sup>Endy Tri Laksono,"Upayah Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015

Tindak Pidana Narkotika karya Muh. Taufik Makaro, S.H., M.H. dalam buku ini membahas tentang tindak pidana narkotika serta akibat penyalahgunaan dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika. Buku tersebut membahas secara umum tentang tindak pidana narkotika dan faktor penyebabnya namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, penelitian yang akan dilakukan penyusun difokuskan pada penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja kepolisian (PolresPinrang).<sup>14</sup>

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berorientasi dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba oleh anggota kepolisian dalam lingkup kerja kepolisian (Studi kasus Kepolisian Resort Pinrang).
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Pinrang dan jajaran dalam penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja kepolisian (Studi kasus Kepolisian Resort Pinrang).

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan menghasilkan kegunaan sebagai berikut:

###### **a. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam

---

<sup>14</sup>Moh. Taufik Makkoro dkk, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). h.35

bidang ilmu hukum tentang penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja kepolisian.

b. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi Ilmu hokum, khususnya menyakut hokum pidana dalam kaitannya penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja kepolisian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba***

##### **1. Definisi Narkoba**

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya, selain narkoba, istilah lain yang memperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua Istilah ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.<sup>1</sup>

##### **2. Sejarah Narkoba**

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama di kenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina.

Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang orang Cina, pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional . yaitu menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai jepang tibanya pemerintah Jepang di Indonesia. kemudian Pemerintah penduduk Jepang

---

<sup>1</sup> Ruhana", *Artikel Narkoba*. <https://ruhanafm93mhz.wordpress.com/artikel-narkoba/> (14 April 2017)

menghapuskan undang-undang itu dan melarang pemakaian candu ( *Brisbane Ordinance*).

Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon coca (cocaine)* banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat undang-undang (*Verdovende middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No 278 Juncto 536*).

Meskipun demikian obat-obatan sintesisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (*Gaette No. 419, 1949*).<sup>2</sup>

Kemudian pada tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua negeri, terutama di Amerika Serikat. Penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu bersamaan.

---

<sup>2</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkotika> (23 Mei 2017)

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1961 dengan membentuk Badan Koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/7, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkoba, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan undang-undang narkoba warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkoba (Pasal 23), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.<sup>3</sup>

Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-undang narkoba mulai direvisi. Sehingga disusunlah undang-undang No. 22 tahun 1997, menyusul dibuat Undang-undang psikotropika No. 5 tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, dengan memberi sanksi terberat berupa hukuman mati.

Dan jauh sebelum Indonesia mengenal narkoba, sekitar tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga *opion* atau kemudian dikenal *Opium* (candu = *papaver somniferum*) bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, China dan wilayah-wilayah Asia lainnya. China kemudian menjadi tempat yang sangat subur

---

<sup>3</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> ( 23 Mei 2017)

dalam penyebaran Candu (dikarenakan iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XIX masalah candu ini bagi China telah menjadi masalah nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya China ditaklukkan Inggris dengan harus merelakan Hongkong.

Tahun 1806 seorang dokter dari West Phalia bernama Friedrich Willhelim Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur Amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (Diambil dari nama dewa inti Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1856 pecah perang saudara di Amerika Serikat Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebagaimana tahanan-tahanan tersebut “ketagihan” disebut sebagai ”penyakit tentara”. Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Weright dari London, merebus cairan Morphindengan Asam Anhidrat (cairan asam yang ada pada jenis jamur), campuran ini membawa efek ketika diujicoba kepada anjing kemudian anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah.

Namun tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit (pain killer). Tahun 60-an sampai 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah “golden triangel” yaitu Myanmar, Thailand dan Laos, dengan produksi 7.000 ton setiap tahun. Pada daerah “golden crescent” yaitu Pakistan, Iran, dan Afganistan dari Golden Crescent menuju Afrika dan Amerika.<sup>4</sup>

Selain Morphin dan Heroin ada juga jenis lain yaitu Kokain (ery throxyllor coca) berasal dari tumbuhan Coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan asma dan TBC. Pada akhir tahun 70-an ketika tingkat

---

<sup>4</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> ( 23 Mei 2017)

tekanan hidup manusia semakin meningkat serta teknologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat dan pil.<sup>5</sup>

### 3. Jenis-Jenis Narkoba

Narkotika adalah zat sintetis maupun semi sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaanya. Adapun jenis narkotika adalah.<sup>6</sup>

#### a. Morfin

Morfin berasal dari kata *Morpheus* ( dewa mimpi ) adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini berkerja pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.

#### b. Heroin/Putaw

Heroin dihasilkan dari pengolahan Morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.

#### c. Ganja / *Kanabis* / *Mariyana*

Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia ( rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab ). Tumbuhan ini telah dikenal

---

<sup>5</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> ( 23 Mei 2017)

<sup>6</sup> [http://kreatifdancerdass.blogspot.co.id/p/blog-page\\_80.html?m=1](http://kreatifdancerdass.blogspot.co.id/p/blog-page_80.html?m=1) (11 April 2017)



manusia sejak lama, seratnya digunakan sebagai bahan pembuat kantung, dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Awalnya tanaman ini hanya ditemukan dinegara-negara beriklim tropis. Namun belakangan ini, di Negara-negara beriklim dingin pun telah banyak membudidayakan tanaman ini, yaitu dengan cara dikembangkan dirumah kaca.

d. Kokain

Kokain merupakan berasal tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain mempunyai 2 bentuk yakni :

1. Kokain Hidrokloria, berupa Kristal berwarna putih.
2. Kokain free base, kokain bentuk ini tidak berbau

e. LSD atau Lydergic Acid/Acid/Trips/Tabs

Adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil.

f. Opiat/Opium

Adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunaka untuk menghilangkan rasa sakit.

g. Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan / diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. Kodein merupakan hasil proses dari metilasi morfin.

h. Metadon

Narkotika jenis ini memiliki kesamaan dengan Narkotika jenis Heroin

i. Barbiturat

Narkotika jenis ini biasa digunakan sebagai obat tidur.

#### 4. Jenis-jenis Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik amaliah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku penggunaannya, adapun jenis-jenis psikotropika sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Ekstasi

Adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk. Nama lain dari psikotropika jenis ini adalah Inex, Metamphetamines.

b. Sabu-sabu

Merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi.

c. Sedatif-Hipnotik

Nama lain dari jenis psikotropika ini adalah Benzodiazepin/BDZ, BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Dalam ilmu kesehatan biasanya dokter memberikan obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panic yang membuat insomnia.

d. Nipam

Adalah jenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi anseitas. Biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol yang sebenarnya beresiko bahaya bagi penggunaannya.

---

<sup>7</sup> AST Boas Parulina, "Jenis-Jenis Narkoba", *Blog AST Boas Parulina*. [http://kreatifdancerdass.blogspot.co.id/p/blog-page\\_80.html?m=1](http://kreatifdancerdass.blogspot.co.id/p/blog-page_80.html?m=1) (11 April 2017)

e. *Angel Dust* (PCP/*Phencyclidine*)

*Angel Dust* termasuk halusinogen. Zat ini dikonsumsi sebagai sampingan oleh pengguna narkoba terutama di Amerika Serikat. Obat ini diproduksi dalam bentuk bubuk dan cair, biasanya disemprotkan ke bahan berdaun seperti ganja, mint, oregano, peterseli atau jahe daun, dan rokok.

f. *Speed*

*Speed* atau biasanya disebut *methamphetamine* merupakan stimulant sistem saraf pusat yang kuat dan adiktif. Obat ini berbentuk bubuk dan berwarna putih, tidak berbau, dan berasa pahit.

g. *Demerol*

Adalah jenis narkoba yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan nyeri. Jika over dosis, obat ini dapat berakibat kematian bagi penggunanya.

## 5. Jenis-jenis Zat Adiktif

Zat Adiktif merupakan zat yang berbahaya, yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah baik semi sintetis maupun sintetis. Zat ini dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang bekerja mengganggu sistem saraf pusat. Contoh zat adiktif : lem, acetone, ether dan sebagainya. Dan yang tergolong jenis narkoba yakni:<sup>8</sup>

a. *Alkohol/Etanol*

Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat. Ia juga bisa berfungsi sebagai zat pengawet. Dalam dunia otomotif, alkohol/etanol digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, dimana alkohol dapat digunakan sebagai

---

<sup>8</sup> AST Boas Parulina, "Jenis-Jenis Narkoba", *Blog AST Boas Parulina*. [http://kreatifdancerdass.blogspot.co.id/p/blog-page\\_80.html?m=1](http://kreatifdancerdass.blogspot.co.id/p/blog-page_80.html?m=1) (11 April 2017)

antibeku pada radiator. Alkohol mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik yang dihisap.

b. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alamia oleh tumbuh-tumbuhan sejenis suku terung-terungan, seperti tembakau dan tomat. Nikotin merupakan salah satu racun saraf. Jenis zat ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan insektisida. Pada seorang perokok, proses kerja nikotin adalah masuk dalam paru-paru untuk selanjutnya diserap oleh aliran darah, dan dalam waktu kurang lebih 8 detik, zat ini akan sampai ke otak untuk selanjutnya merubah kerja otak. Proses penyebaran racun ini berlangsung cepat dikarenakan bentuknya mirip dengan *acetylcholine* yang normal terdapat didalam otak.

c. Kafein

Kafein adalah zat adiktif yang berkerja untuk mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Kafein juga digunakan sebagai pengurang rasa lelah serta untuk mencegah rasa kantuk. Bagi para atlet, kafein biasanya dapat meningkatkan daya tahan agar kuat dalam berlari. Namun zat ini adalah penyebab asma. Kafein dapat menyebabkan efek kecanduan bagi penggunaannya.

d. Zat desainer

Merupakan zat yang dibuat secara ilegal. Zat ini sangat dilarang pemerintah untuk dikonsumsi. Zat-zat ini sudah banyak beredar dengan nama speed ball, peace pills, crystal, angel dust rocket fuel. Adapun efek penggunaan zat ini hamper sama dengan efek yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba jenis yang lainnya.

Kebanyakan jenis-jenis narkoba yang beredar dipasaran internasional adalah berbentuk seperti sagu. Serbuk putih, kuning, atau kecoklat-coklatan.

## **6. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkoba**

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KHUPidana sebagai dasar peraturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>9</sup>

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana narkotika diklasifikasikan sebagai berikut:

### **a. Sebagai pengguna**

Klasifikasi pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pada klasifikasi ini, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

### **b. Sebagai pengedar**

Bentuk pidana sebagai pengedar yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan narkoba. Pada bentuk pidana ini dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 ditambah denda.

---

<sup>9</sup> Sulis Setyowati, "Tindak Pidana Khusus". <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/> (12 April 2017)

c. Sebagai produsen

Bentuk pidana sebagai produsen yang dimaksud adalah orang yang melakukan kegiatan atau menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung.

Pada bentuk pidana ini, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/ mati ditambah denda.

## **7. Pandangan Islam Tentang Narkoba**

Pada dasarnya kata Narkotika tidak tercantum dalam alquran maupun hadist, namun narkoba ini di kaitkat dengan kata khamar karna sama-sama ada dampak yang ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam, dan salah satu sumber hukum islam itu yaitu dengan menggunakan metode kias atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. Kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karna adanya persamaan. Sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalagunaan narkoba bahkan lebih dasyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat alquran yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalagunaan narkoba. Berikut ayat-ayat alquran yang mengharamkan :

Q.S Al-Baqarah/2:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ...

*Terjemahnya:*

"Meraka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah:" pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepada (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah:"kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah Menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya." (Q.S Al-Baqarah/2:219).<sup>10</sup>

Kaum Muslimin bertanya kepadamu wahai Nabi, tentang hukum memanfaatkan khamar (minuman keras) untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Khamar adalah semua apa saja yang memabukkan lagi menghilangkan dan menutup akal, baik berupa makanan ataupun minuman, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum judi, yaitu mengambil harta atau menyerahkannya dengan sadar perjudian, satu bentuk taruhan dari kedua belah pihak katakanlah kepada mereka, pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkan terhadap agama, dunia, akal, dan harta. Dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun dosa akibat keduanya lebih besar daripada aspek kemanfaatannya.<sup>11</sup>

Orang yang meminum minuman keras sampai mabuk, tidak dapat mengendalikan diri dan akal budinya. Nafsu-nafsu buruk yang selama ini dapat ditekan dengan kesopanan, apabila telah mabuk tidak dapat lagi dikendalikan. Sehingga jatuhlah kemanusiaan orang itu, bercarut-carut, memaki-maki. Datanglah panggilan shalat, karena mabuk dia tidak peduli lagi. Orang mabuk dengan tidak sadar, bisa memukul orang lain, ataupun sampai membunuh. Kelak kalau sudah sadar dia merasa menyesal. Pendeknya amat besarlah dosa yang ditimbulkan oleh mabuk

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemah*(Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009) h.34

<sup>11</sup> Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *At-Tafsir al-Muyassar* (Madinah KSA: Mushaf A-Quran, 1437 H). h.102-103

itu, sebab menjatuhkan martabat sebagai manusia. Malahan merusak kepada pencernaan makanan, karena panas bekasnya, meskipun bahwa manfaatnya ada. Orang yang tadinya kurang berani, kalau sudah minum akan menjadi berani dan gagah, tidak takut menghadapi musuh. Setelah diterangkan terlebih dahulu bahwa dosanya besar, tetapi manfaatnya pun tidak dipungkiri, wahyu meneruskan “tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Disini Rasulullah diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepada umat untuk berfikir dengan mempertimbangkan terlebih dahulu manakah yang besar dosa atau manfaatnya.<sup>12</sup>

Kemudian Yang disebut khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman ini adalah khamar sehingga haram hukumnya meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan.<sup>13</sup>

Kata khamar berarti menutupi sesuatu. Disebut demikian, sebab zat/benda tersebut jika dikonsumsi maka akan menutupi akal untuk berfikir. Sedangkan yang dimaksud dengan khamar adalah segala bentuk minuman yang dapat memabukkan, penafsiran ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i sementara Abu Hanifah berkata bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah air yang diambil dari buah anggur melalui proses perasan lalu dididamikan yang kemudian dapat memabukkan.

Argumen diatas dapat diuraikan dengan beberapa hujjah berikut:

---

<sup>12</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar juzu' 1* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). h.187

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h.467



1. Para sahabat mengetahui bahwa keharaman khamar yakni segala minuman yang dapat memabukkan tanpa membedakan apakah ia berasal dari anggur atau bukan.
2. Berdasarkan riwayat Al-Tirmidzi bahwa segala sesuatu yang memabukkan maka disebut khamar.
3. Didasarkan pada riwayat An-Nu'man bin Basyir bahwa Nabi saw. Bersabda sesungguhnya minuman yang berasal dari anggur, kurma, madu, gandum, semuanya dikategorikan khamar.
4. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa jika ditemukan makanan yang dapat memabukan melalui proses fermentasi seperti buah jagung, apel, bawang maka semuanya dikategorikan sebagai khamar, sebab makanan-makanan yang disebut sebelumnya seperti anggur, kurma hanya pada masa nabi.

Kemudian pekerjaan meminum khamar dan berjudi adalah perbuatan dosa, mengandung kerusakan yang besar serta membawa kerusakan besar pula. Dampak negatifnya langsung kepada kesehatan tubuh, gangguan psikolog, daya ingat menjadi turun, harta menjadi habis.<sup>14</sup>

Q.S Al-Maidah/4:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

...

*Terjemahnya:*

”Hai orang-orang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

---

<sup>14</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 1 ( Cet I; Mesir: Maktabah Al-Halbi, 1365 H/ 1946 M), h.142-145

perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S Al-Maidah/4:90).<sup>15</sup>

Allah mencela perbuatan yang buruk, dia menjelaskan bahwa semua itu adalah perbuatan setan, bahwa itu adalah perbuatan buruk, maka jauhilah dan tinggalkan, karena keberuntungan tidak diraih kecuali dengan meninggalkan larangan allah, yaitu perbuatan-perbuatan buruk yang disebutkan disini, ia adalah khamar yaitu semua merusak akal dengan menutupinya karena mabuk, judi yaitu semua permainan yang memiliki bayaran dari kedua belah pihak seperti taruhan dan sebagainya. Berhala yaitu sesembahan sesuatu yang diangkat serta disembah selain allah, allah melarang perbuatan itu, mencercanya, dan menjelaskan dampak negatif yang menuntut untuk meninggalkannya.<sup>16</sup>

Telah diberi petunjuk kepada orang yang beriman tentang memilih makanan yang halal dan baik, yang telah dilarang mengharamkan apa yang dihalalkan allah. Maka teraturlah makanan mereka. Makanan yang teratur dan baik besar pengaruhnya terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Di haramkan *Khamar* ialah sekalian minuman yang menimbulkan dan menyebabkan mabuk.<sup>17</sup>

Dalam tafsir Al-Maragi maksud dari ayat diatas adalah hai orang-orang yang mempercayai allah dan rasulnya, sesungguhnya khmar yang kalian konsumsi, perjudian yang kalian mainkan, berhala-berhala yang kamu sembah, serta panah-panah yang digunakan untuk mengundi nasib adalah bentuk kegiatan (dosa) yang semuanya sangat dibenci allah dan merupakan perjerjaan syaitan. Segala perkerjaan

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemah*(Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009) h.123

<sup>16</sup> Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'dir, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, (Cet II; KSA: Dar Ibn Al-Jauzi, 1426 H). h.389-390

<sup>17</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar juzu' 7* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). h.1860

diatas diperintahkan allah untuk di jauhi karena allah tidak menganjurkan dan tidak meridhai.<sup>18</sup>

Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan minum khamar dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara membinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasakan agama. Begitu pula halnya dengan pengagungan berhala, karena ia merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan allah) jika berhala itu disembah, dan merupakan syirik tersembunyi bila dilakukan penyembelihan atas namanya meskipun tidak disembah. Maka dirangkaikanlah dengan larangan pengagungan berhala itu adalah salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi dengan anak panah. Dan setelah itu semua itu dikemukakan, kesemuanya di himpun beserta alasan yaitu bahwa semua itu adalah *rijs* ( perbuatan keji). Pendapat mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadarnormal oleh seseorang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak.<sup>19</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الْعَدْوَةَ وَالْبَغْضَا فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ  
فَهَلْ أَنْتُمْ...

Terjemahnya:

”Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dalam mengingat allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S Al-Maidah/4:91).

---

<sup>18</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi juz 1* ( Cet I; Mesir: Maktabah Al-Halbi, 1965 H/ 1946 M). h.23-35

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera hati, 2002). h.192

Maksud ayat diatas adalah perkara-perkara tersebut adalah pemicu permusuhan dan kebencian diantara manusia, dan setan itu rajin menghembuskannya khususnya melalui khamar mengakibatkan terganggunya akal dan hilangnya daya kerja yang menyulut permusuhan antara dirinya dengan saudara-saudaranya yang mukmin. Lebih-lebih jika hal itu diiringi dengan sebab-sebab yang merupakan konsekuensi dari mabuk bisa sampai membunuh. Sementara judi, dimana salah satunya mengalahkan yang lain dan menyita hartanya tanpa imbalan apapun adalah salah satu pemicu terbesar bagi permusuhan dan kebencian. Perkara-perkara ini menghalangi hati dan diikuti badan dari berdzikir (mengingat) Allah dan shalat, yang mana seorang hamba diciptakan untuk kedua ibadah tersebut dan dengan keduanya kebahagiaan dapat diraih. Khamar dan judi menghalangi hal itu dengan kadar yang besar, membuat hati dan pikirannya sibuk dari keduanya sehingga waktu yang panjang berlalu, sementara dia tidak mengetahui dimana dia berada. Kemaksiatan apa lagi yang lebih besar dan lebih buruk daripada kemaksiatan yang mengotori pelakunya, menjadikannya termasuk orang-orang yang buruk, menjerumuskan kedalam perbuatan setan dan jebakannya sehingga dia mengikutinya seperti binatang ternak yang mengikuti pengembalanya. Dan menghalangi keberuntungan seorang hamba, menyulut permusuhan dan kebencian diantara orang-orang mukmin. Maka Allah melarangnya dan memerintahkan untuk ditinggalkan.<sup>20</sup>

Sangat jelas dari terjemahan dan tafsir ayat di atas bahwa khamar adalah perbuatan syaitan yang terlarang (haram), namun tidak dijelaskan haramnya narkoba, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keharaman narkoba diqiyaskan dengan haramnya khamar, karena unsur-unsur yang ada dalam khamar sama dengan

---

<sup>20</sup> Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'dir, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, (Cet II; KSA: Dar Ibn Al-Jauzi, 1426 H). h.390-391

yang ada dalam narkoba. Qiyas dengan mengambil persamaan *illat* hukum dari khamar yang sudah jelas hukumnya dengan narkoba yang antara lain di dalamnya terdapat narkoba merupakan masalah kontemporer yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an.<sup>21</sup>

Selain Al-quran hadist juga merupakan sumber hukum islam, hadist adalah perkataan yang bersumber dari nabi Muhammad S.a.w. adapun hadist yang mengharamkan Khamar yakni:

كَرَّفَهُ

22( )

Artinya:

“Dari aisyah r.a., katanya nabi: Rasulullah saw. Pernah ditanya tentang sebangsa minuman keras yang terbuat dari madu, bernama *bit'i* beliau berkata: “setiap minuman yang memabukkan haram (H.R Al-Bukhori)”.

Hadits diatas merupakan salah satu hadits yang melarang untuk mengkonsumsi khamar walaupun hadist diatas tidak mengaskan bahwa narkoba adalah khamar tetapi unsur narkoba sama dengan khamar yang dapat menghilangkan kesadaran (mabuk) ketika dikonsumsi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak pidana**

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid IV*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.326

WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>23</sup> Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*. artinya,

---

<sup>23</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). h.192

<sup>24</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*. h.193

<sup>25</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 98.

perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.<sup>26</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusnya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Jenis tindak pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. h.102

misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*delikdolus*) dan kealpaan(*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Yang pertama adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, penipuan dan pembunuhan. Yang kedua adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Yang dimaksud dengan tindak pidana terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang dirampas kemerdekaanya itu belum dilepas, maka selama itu pula delik itu masih berlangsung terus menerus. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

Tindak pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari



pihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

Kemudian, Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat, seperti dalam Pasal 363 dan 365 KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP.<sup>27</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari

---

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. h.104

perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.<sup>28</sup>

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Para ahli:

1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah: perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh yang orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
2. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum). *Aan schuld te wijten* ( telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja), dan *statbaar* (dapat dihukum).
3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handling* (perbuatan manusia), *strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).
4. Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana : Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materil) unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri

---

<sup>28</sup> Pusat Hukum, “Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Blog Pusat Hukum*. <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1> (02 Maret 2017)

dari hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi, unsur subjektif atau peribadi.

#### 1) Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terdapat akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwa.

#### 2) Unsur Material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsure subjektif. Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya ( Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

### 3) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memelurkan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), Pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakuakn di muka umum.

### 4) Unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi; Pertama Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). Kedua Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. Ketiga Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP). Keempat Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

##### 5) Unsur yang memberatkan tindak pidana

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain

baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada Pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman

(*afdereiging*, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu:
  - b) Mencocokkan rumusan delik
  - c) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
  - a) Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* atau *culpa*);
  - b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia***

#### **1. Definisi Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional merupakan satu kesatuan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas, Anggota kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil, Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Republik Indonesia

#### **2. Fungsi dan tugas Kepolisian Republik Indonesia**

Fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kepolisian no 22 tahun 2002 pasal 2 :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam melaksanakan tupoksi Kepolisian Republik Indonesia Melakukan kegiatan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 22 Tentang kepolisian (Bandung: Cintra Umbara, 2010). h. 5

<sup>30</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 22 Tentang kepolisian h. 5



- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
- Turut serta dalam pembinaan sosial
- Memelihara ketertiban masyarakat dan menjamin keamanan umum
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi untuk kepentingan tugas polisi
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhan tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga kordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut G. Gewing dalam buku Djoko Prakoso menyebutkan tugas polisi adalah bagian daripada tugas Negara perundangan-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kepatuhan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) ada hukum yang dikonsepsiakan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana berkerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan di fokuskan pada Kantor Kepolisian Resor Pinrang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan ada dua. Pendekatan penelitian ini akan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Adapun kedua pendekatan ilmiah yang akan digunakan, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat.

## **C. Sumber Data**

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dengan wawancara bersama Kasat Reskrim Narkoba Polres Pinrang AKP Andarias PP
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.<sup>1</sup>
2. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Drs. Cholid Narbuko/Drs. H. Abu Achmadi, *metodologi penelitian*,(Jakarta: Bumi Askara,2012). h.83

<sup>2</sup>Drs. Cholid Narbuko/Drs. H. Abu Achmadi, *metodologi penelitian*,(Jakarta: Bumi Askara,2012). h.70

### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi Instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri sehingga penelitian harus “di validasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Selain dari pada itu, juga diperlukan instrument penelitian berupa :

1. Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.
2. Handphone berfungsi sebagai alat komunikasi yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu penelitian ini, utamanya aplikasi kamera video, kamera foto, dan recorder suara.

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.

2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan .

Adapun analisis data yang digunakan yakni análsis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan análsis konseptual dan teoretik.

#### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :

##### **1. Uji Credibility ( validasi internal )**

Uji credibility antara lain dilakukan dengan cara :

- a. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredinilitas data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.
- b. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- c. Menggunakan vahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara.

##### **2. Transferability ( validasi eksternal)**

Pengujian Transferability merupakan valisdasi eksternal, agar hasil penelitian dapat digunakan dan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan dengan membuat laporan yang dapat diurai secara jelas, rinci dan sistematis.

3. Depandability (reabilitas )

Dalam penelitian kualitatif, uji depandability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh audito yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan penelitian dalam melakukan penelitian.

4. Comfirmability ( objektifitas )

Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji defendability, karena pengujian ini harus melibatkan orang lain.



## BAB IV

### NARKOBA DAN PENANGGULANGANNYA DI LINGKUP KERJA KEPOLISIAN RESORT PINRANG

#### A. Deskripsi Kepolisian Resort Pinrang

Kabupaten Pinrang terletak dibagian barat pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak sejauh 185 KM dari Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 Kelurahan dan 65 Desa. Batas wilayah Kabupaten ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pare-Pare. Luas wilayah Kabupaten 1.961,77 KM.<sup>1</sup>

Kabupaten Pinrang Memiliki garis pantai sepanjang 93Km sehingga terdapat areal pertambangan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian ( Tanaman Pangan, Perikanan, Perkebunan, dan Perternakan) sumber daya alam tersebut yang digunakan masyarakat sebagai mata pencarian di Kabupaten Pinrang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kabupaten Pinrang”, *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas.*  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pinrang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pinrang). (27 Mei 2017)

<sup>2</sup>Kabupaten Pinrang”, *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas.*  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pinrang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pinrang). (27 Mei 2017)



Kabupaten Pinrang Masuk dalam wilayah hukum Polres Pinrang, Polres Pinrang terdiri dari 10 Polsek dan 2 Polsubsektor diantaranya, Polsek Lembang, Polsek Duampanua, Polsek Patampanua, Polsek Cempa, Polsek Pers. Paleteang, Polsek Watang Sawitto, Polsek Tiroang, Polsek Mattio Bulu, Polsek Mattiro Sompe, Polsek Suppa, Polsubsektor Batu Lappa dan Polsubsektor Lainrang, dengan jumlah personil 529 orang.

Adapun visi dari Kepolisian resort Pinrang yaitu “Terwujudnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban masyarakat Prima, tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan diwilayah Polres Pinrang serta Terselenggaranya sinergi polisional secara optimal” sedangkan Misi dari Polres Pinrang sendiri yakni:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif
- Menerapkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum kepada semua komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Pinrang
- Melakukan Kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintah daerah maupun masyarakat dalam rangka mendukung operasional kepolisian diwilayah hukum Polres Pinrang.
- Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan gangguan kmtibmas yang bisa

terjadi di wilayah hukum Polres Pinrang Melalui Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan.

- Menjaga keamanan, ketertiban lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, orang dan barang.
- Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Pinrang
- Menegakkan hukum secara profesional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
- Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern semua sumber daya yang tersedia guna mendukung operasional Polres Pinrang

Polres Pinrang dalam tiga tahun ini sudah menangani beberapa kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota kepolisian diantaranya, IYS yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pinrang, SP anggota Reserse Polsek Baranti Kabupaten Sidrap, EC anggota Kepolisian resort Mamasa serta NR Anggota Kepolisian Resort Enrekang.

***B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Lingkup Kerja Kepolisian Resort Pinrang***

Tindak pidana Narkoba dalam hal ini peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba sudah marak terjadi bahkan tidak hanya terjadi di Kota Besar namun juga telah merambah ke kota-kota kecil, seperti diketahui bersama bahwa di Indonesia Kejahatan Narkoba telah dikategorikan Sebagai Extraordinary crime.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Namun hal yang sangat disayangkan ketika nama kepolisian diangkat karna kemampuannya yang untuk memberantas narkoba di kotori dengan adanya anggota kepolisian yang terlibat dalam peredaran narkoba bersama para sindikat narkoba yang sedang diincar.

Kejahatan yang dilakukan tentunya memiliki alasan-alasan atau faktor yang mendorong anggota kepolisian tersebut melakukan tindak pidana Narkoba. Ada berbagai macam faktor yang mendorong seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkoba. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni.<sup>3</sup>

1) Faktor Internal Pelaku

---

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*.h.56

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain: perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa, rasa keingintahuan.

**Perasaan egois** merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

Dalam hal ini faktor perasaan egois juga sering mempengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam tindak pidana narkoba, keegoisan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun walau harus melawan hukum dengan menggunakan narkoba sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu anggota Kepolisian resort Pinrang Bripta Ridwan menyatakan bahwa faktor rasa egois merupakan faktor pendorong anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, karena rasa egois lebih mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan Negara.<sup>4</sup>

**Kehendak ingin bebas**, sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan

---

<sup>4</sup> Ridwan (35 tahun), Anggota Kepolisian Resort Pinrang, Wawancara, Pinrang, 20 April 2017.

interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang terjerumus pada tindak pidana narkoba.

**Kegoncangan jiwa**, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya narkoba. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peran yang penting, hal ini biasa terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng, keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif. Sebab orang-orang yang semacam ini tidak dapat menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif.<sup>5</sup>

## 2) Faktor Eksternal Pelaku.

Merupakan faktor yang datang dari luar, faktor-faktor ini banyak sekali ada pun beberapa yang paling penting diantaranya sebagai berikut: keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan, kemudahan, ketidaksenangan dengan keadaan sosial.

**Faktor Keadaan Ekonomi** ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin, pada keadaan yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang

---

<sup>5</sup> B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982). h.68

akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba, sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkoba terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Narkoba Polres Pinrang AKP. Andarias BP mengemukakan bahwa kasus yang melibatkan anggota kepolisian dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, pelaku biasanya tertarik dengan imbalan yang diberikan karena angka yang lumayan besar sehingga dengan imbalan itu pelaku dapat mewujudkan keinginannya meskipun pelaku sadar bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

**Faktor pergaulan/lingkungan,** pada umumnya terhadap seseorang, pergaulan terdiri ‘dari pergaulan//lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

---

<sup>6</sup> Andarias.BP (51 tahun), Kasat Reskrim Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 20 April 2017.

**Faktor ketiga, Kemudahan.** Yang dimaksud disini dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

Dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan serta menyalurkan narkoba membuat peluang besar bagi para pengedar untuk mengedarkan narkoba di Indonesia, kemudahan yang didapat oleh para pengedar didapat ketika penyaluran narkoba yang dilakukan melibatkan pihak lain yang memiliki wewenang seperti polisi hal ini juga termasuk faktor yang melatarbelakangi anggota kepolisian terjerumus dalam tindak pidana peredaran narkoba. Hal tersebut juga dikemukakan oleh AKP. Andarias BP dalam wawancara bersama penulis.

**Faktor keempat, Kurangnya pengawasan.** Yang dimaksud disini adalah pengendalian terhadap ketersediaan narkoba, penggunaan, dan peredaran. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peran penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Disisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat sejogya nya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat ke perbuatan yang tergolong tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksud di atas maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

**Faktor Kelima, Ketidak senangan dengan keadaan sosial.** Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk

melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat untuk melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Faktor-faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba. Tetapi tindak pidana narkoba juga dapat disebabkan lebih dari satu faktor yang telah diuraikan, karena faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

Faktor-faktor diatas merupakan faktor umum yang melatarbelakangi pelaku terjerumus dalam tindak pidana narkoba, namun hanya beberapa faktor yang melatarbelakangi anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dikemukakan AKP.Andarias BP selaku Kasat Reskrim Narkoba Kepolisian Resort Pinrang dalam wawancaranya bersama penulis bahwa kasus yang melibatkan salah anggota kepolisian dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan faktor kemudahan, contoh kasus yang baru-baru terjadi yang melibatkan anggota kepolisian berinisial SP berawal dari sebuah imbalan yang besar yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan profesinya sebagai polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, SP yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian di titipi narkoba untuk disimpan dirumahnya dengan dijanjikan imbalan Rp.10.000.000 setiap 1 kg narkoba. SP sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan tindakan memberantas penyalahgunaan tetapi yang dilakukan sebaliknya. Ini juga sudah masuk penyalahgunaan wewenang/profesi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Andarias.BP (51 tahun), Kasat Reskrim Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 20 April 2017.



Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor eksternal yang melatarbelakangi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor kemudahan.

Kedua faktor tersebut datang dari luar diri pelaku, namun faktor eksternal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti faktor keegoisan dimana anggota polisi yang mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan negara.

Anggota kepolisian yang telah terjerumus dalam tindak pidana narkoba serta menggunakan profesi dan wewenangnya sebagai polisi juga sudah melanggar peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 5 huruf d dan i, yang menegaskan bahwa :

“Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.”

Serta dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah dan janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini sudah bisa membuktikan bahwa tindak pidana narkoba di indonesia sudah sangat memprihatikan karena anggota kepolisian yang seharusnya melakukan

tindakan memberantas ikut terjerumus serta menyalahi atauran yang ada dengan menggunakan wewenang dan jabatan sebagai polisi.

Kemudian dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang berkerjasama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara, serta menjadi perantara/makelar perkara;

Peredaran narkoba yang telah memasuki wilayah kerja kepolisian merupakan ancaman yang sangat besar untuk Negara Republik Indonesia dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, karena kepolisian juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab dalam melakukan tindakan memberantas Narkoba jika anggota dari lembaga tersebut melakukan tindak pidana narkoba maka akan sia-sia tindakan pemberantasan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki wewenang dalam memberantas narkoba di Indonesia.

Hal ini bisa menjadi acuan Kepolisian republik Indonesia sebagai garda depan dalam memerangi narkoba, serta Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan kinerja untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

***C. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredaran narkoba pada lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang***

Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana Narkoba terus berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam memberantas terjadinya tindak pidana narkoba, hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara TNI serta BNN dalam melakukan tindakan penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Di ketahui pula bahwa kejahatan tindak pidana narkoba sudah memasuki semua sektor di negara ini serta mengancam Institusi Polri dan TNI terbukti dengan adanya kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota dari institusi tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Polri tidak lepas dari tindakan-tindakan yang bersifat interdisipliner. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan penanggulangan serta pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yakni:

1. Upaya Promotif/pre-emitif merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Tindakan Polri ini dilakukan dengan melihat akar masalah penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan sosial, tindakan Pre-emitif yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini

untuk antisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

2. Upaya preventif (pencegahan) anggota-anggota kepolisian diterjunkan langsung kewilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.
3. Kuratif (Program Pengobatan) upaya ini ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.<sup>8</sup> Dalam upaya ini Polri tidak berkerja sendiri, Polri berkoordinasi dengan BNN.
4. Rehabilitas upaya ini adalah pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang menjalani program kuratif, tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang

---

<sup>8</sup> Subagyo Partodiharjo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga 2014). h.102

disebabkan oleh beban pemakaian narkoba.<sup>9</sup> Dalam upaya ini polri juga berkerjasama dengan BNN

5. Represif (penindakan) upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas serta meenangulangi penyalagunaan dan peredaran narkoba cara yang ditempuh dengan melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan polri untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalagunaan dan peredaran narkoba. Upaya ini berlaku juga untuk anggota instansi Polri.

Selain upaya di atas polri juga melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung upaya yang telah dilakukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi.

1. Kampanye anti penyalagunaan narkoba, hal ini di lakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicaraan tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat (ulama, pejabat Polri, Seniman dan sebagainya). Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, postor, brosur dan baliho. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan

---

<sup>9</sup> Subagyo Partodiharjo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga 2014). h.105

untuk melawan penyalahgunaan narkoba. Tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

2. Penyuluhan seluk beluk narkoba berbeda dengan kampanye yang menolong, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karena tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih dalam. Biasa penyuluhan ini dibawakan oleh dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog- sesuai dengan tema penyuluhan.
3. Upayah mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat. Pengawas dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti Polisi, Departemen kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya dari kegiatan ini adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, Program ini belum berjalan Optimal.

Namun untuk menanggulangi serta memberantas tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota kepolisian Polri juga melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Memperdayakan Kader anti Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba.

2. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian, pengawasan ini berperan penting untuk mencegah dan menanggulangi keterlibatan anggota polisi dalam tindak pidana narkoba, kemudian petugas dan pengawas harus lebih mengetahui dan memahami adanya potensi anggota terlibat sehingga anggota tersebut dapat diidentifikasi secara cepat

3. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan uji narkoba terhadap personil Polri

Upaya tersebut ditempuh Polri untuk memperbaiki kader yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan Polres Pinrang sendiri dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota kepolisian khususnya di kabupaten pinrang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasat Reskrim Narkoba Polres Pinrang AKP. Andarias BP mengatakan bahwa upaya penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan kepolisian resort pinrang dengan melakukan tindakan memberantas peredaran yang terjadi di lingkungan kerja maupun di luar dengan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini KAPOLRES Pinrang serta berkoordinasi juga dengan pihak Pengamanan Internal Kepolisian (PROPAM).

Kemudian Polres Pinrang juga melakukan beberapa tindakan untuk upaya penanggulangan hal ini dikemukakan oleh Bripta Ridwan saat wawancara bersama penulis, Adapun tindakan upaya yang dilakukan Polres Pinrang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada saat bebas dinas.

2. Pada waktu apel pagi anggota kepolisian diberi arahan serta himbauan dari pimpinan bahwa anggota yang telah atau belum terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peredaran narkoba agar dihindari dan dihentikan. Agar anggota-anggota yang masih terlibat bisa terlepas dan bisa dibina kembali. Serta yang belum terlibat tetap memegang sumpah dan janji profesi.
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan rohani seminggu sekali pada hari Sabtu dan Minggu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pinrang.<sup>10</sup>

AKB Andarias BP juga berharap semua polisi yang ada di Kabupaten Pinrang dan Indonesia untuk terbebas dari pengaruh-pengaruh narkoba baik sebagai pengguna, pecandu dan kurir dan backing.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis upaya yang dilakukan oleh Polres Pinrang merupakan Upaya Preventif yang dilakukan dengan cara edukatif pembinaan dan pengembangan lingkungan untuk menciptakan hubungan harmonis antara sesama anggota Kepolisian. Dengan adanya upaya penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran anggota kepolisian tentang tugas dan tanggung jawab terhadap keamanan negara.

Penanggulangan secara nasional, yang teramat penting adalah pelaksanaan hukum yang tidak pandang bulu hal ini juga telah dilakukan dan diterapkan oleh Polres

---

<sup>10</sup> Ridwan (35 tahun), Anggota Kepolisian Resort Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 20 April 2017.

<sup>11</sup> Andarias.BP (51 tahun), Kasat Reskrim Narkoba Kepolisian Resort Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 20 April 2017.



Pinrang terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Pinrang tidak semata-mata hanya untuk anggota Kepolisian Polres Pinrang, upaya ini juga ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Pinrang. Kepolisian Resort Pinrang berkerjasama dengan pemerintah kabupaten Pinrang juga telah melakukan beberapa upaya seperti:

1. Melakukan Seminar Bahaya Narkoba
2. Kampanye Anti Narkoba

Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Polres Pinrang yang berkomitmen untuk memerangi narkoba di Kabupaten Pinrang sudah dapat dilihat dari upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam lingkungan pemerintahan, kepolisian dan sekolah. akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Polres Pinrang Tidak akan Efektif tanpa adanya kesadaran diri sendiri dari setiap individual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup Kerja Kepolisian Resort Pinrang yakni berasal dari faktor eksternal, faktor ini merupakan faktor yang datang dari luar diri pelaku, salah satunya faktor ekonomi. Seorang anggota polisi yang dijanjikan imbalan yang besar dengan melakukan dengan melakukan tindakan yang tidak begitu sulit akan tertarik untuk melakukannya, dengan waktu yang singkat dapat menghasilkan uang dengan jumlah yang lumayan besar. Kemudian dengan adanya faktor kemudahan yang didapat dari profesi menjadi faktor utama seorang anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkoba, dengan menggunakan profesinya sebagai polisi, faktor eksternal tersebut juga didorong oleh faktor internal yaitu perasaan egois.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredaran narkoba dalam lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang yakni dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan pendekatan serta penyuluhan secara edukatif. Pendekatan yang dilakukan guna menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota kepolisian terkhusus Kepolisian Resort Pinrang kemudian kegiatan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri setiap anggota kepolisian serta tanggung jawab dan tugas sebagai anggota kepolisian. Upaya pelaksanaan hukum juga termasuk salah satu upaya yang lakukan Polres Pinrang yang telah diterapkan pada anggota kepolisian yang telah terlibat dalam tindak pidana

narkoba. Kasat Narkoba Polres Pinrang berharap agar anggota Kepolisian Republik Indonesia terkhusus Polres Pinrang terbebas dari Pengaruh-Pengaruh narkoba baik sebagai pecandu, pengguna maupun kurir.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memmmberikan saran mengenai Upaya-upaya penanggulangan peredaran narkoba dalam lingkup kerja kepolisian. Untuk mencegah dan memberantas keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba dengan mengadakan evaluasi dan tes urine pada waktu tertentu. Karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Serta dalam proses pelaksanaan hukum yang dijalani oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba berjalan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Tanpa diskriminasi dan toleransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir A-Maragi Jus 1*. Mesir: Maktabah Al-Halbi, 1365 H/ 1946 M
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir A-Maragi Jus 7*. Mesir: Maktabah Al-Halbi, 1365 H/ 1946 M
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar juzu' 1*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar juzu' 7*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982
- Bosu, B. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'andan Terjemah*. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Dadang, Hawari. *Al-Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2004
- Laksono, Endy Tri. "Upayah Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Makaro, Taufik, Suhasril dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nasrul. "Tindak Pidana Psikotropika Yang dilakukan Oleh Anggota POLRI (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.B/2009/PN.MKS)" Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2014.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga, 2014
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Dalam *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Bandung: Fokus Media, 2013
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika". Dalam *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Bandung: Fokus Media, 2013.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian". Dalam *Undang-Undang Republik Indonesia*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid IV*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Syamudra, Irvan. "Tinjauan Kriminologi Peredaran Narkoba (Sabu-Sabu) di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus 2010-2014)" Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2015.

### Sumber Online

Aji , "BNN Tangkap oknum Polisi Jadi Bandar Sabu dan Ekstasi", Berita Bekasi co.id. 23 november 2015. <http://beritabekasi.co.id/2015/11/bnn-tangkap-oknum-polisi-jadi-bandar-sabu-sabu-dan-ekstasi/> ( 23 November 2016).

Dedi. *Sejarah Singkat Narkoba*. <http://dedihumas.bnn.gi.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba/> (23 Mei 2017).

Junedi, "Tertangkap Simpan Sabu-Sabu Seberat 3,4kg Oknum Polisi Terancam Hukuman Mati, Kompas Online. 9 April 2016. [http://googleweb.com/?lite\\_url=](http://googleweb.com/?lite_url=) (23 November 2016) "Kabupaten Pinrang", *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_pinrang/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_pinrang/) (27 Mei 2017).

"Kepolisian Negara Republik Indonesia". [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) (27 Mei 2017).

Pusat Hukum, "Unsur-unsur Tindak Pidana", *Blog Pusat Hukum*. <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1/> (02 Maret 2017)

Parulina, AST Boas. "jenis-jenis Narkoba", *Blog AST Boas AST Parulina*. [http://kreatifdancerdas.blogspot.co.id/p/blog-page\\_80.html?=1](http://kreatifdancerdas.blogspot.co.id/p/blog-page_80.html?=1) (11 April 2017).

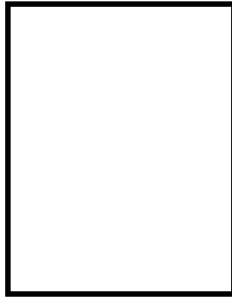
Suwardi, Randi Ariady. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI (Studi Kasus Putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR)" Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, 2013.

Sarjunipandang, ali. "Definisi Penanggulangan", Blogger. <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/definisi-kriminologi.html?m=1/> (25 Maret 2017).

Setyowati, Sulis. "Tindak Pidana Khusus". <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/> (12 April 2017).

Ruhana, *Artikel Narkoba*. <https://ruhanafm93mhz.wordpress.com/artikel-narkoba/> (14 April 2017).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aliyyul Qayyuum Nugraha lahir di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 13 April 1996 anak kedua dari buah hati Bapak Edi Nugraho. S.Pd dan Ibu Hasnah Pendidikan formal di Mulai di SDN 173 Tiroang Kabupaten Pinrang dan lulus pada tahun 2009, Melanjutkan kebangku Mts PPM Rahmatul Asri Maroanging Kabupaten Enrekang dan lulus pada tahun 2011, setelah itu penyusun mendaftarkan dirinya ke SMAN 2 Pinrang dan dinyatakan lulus pada tahun 2013, tidak sampai disitu penyusun melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu Hukum hingga saat ini. Beberapa organisasi dan Kegiatan yang diikuti selama menempuh pendidikan diantaranya Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Periode 2014-2015, Anggota Organisasi Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar, Pengurus Organisasi Kesatuan Mahasiswa Pinrang (KMP) Komisariat UIN Alauddin Makassar.